



BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2019, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4082);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005



- Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);



25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

dan

BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2019.



## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp1.826.466.358.456,00 bertambah sejumlah Rp78.863.676.343,58 sehingga menjadi Rp1.905.330.034.799,58 dengan rincian sebagai berikut:

### 1. Pendapatan

a. Semula	Rp 1.770.598.676.856,00
b. Bertambah	<u>Rp 32.984.298.988,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp 1.803.582.975.844,00

### 2. Belanja

a. Semula	Rp 1.821.466.358.456,00
b. Bertambah	<u>Rp 78.674.094.577,58</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	<u>Rp 1.900.140.453.033,58</u>

### 3. Pembiayaan

#### a. Penerimaan

1) Semula	Rp 55.867.681.600,00
2) Bertambah	<u>Rp 45.879.377.355,58</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp 101.747.058.955,58

#### b. Pengeluaran

1) Semula	Rp 5.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 189.581.766,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp 5.189.581.766,00

## Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

#### a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp 235.221.112.856,00
2) Bertambah	<u>Rp 13.971.490.988,00</u>

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp 249.192.603.844,00

#### b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp 1.123.492.210.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 918.180.000,00</u>

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp 1.124.410.390.000,00



c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Semula	Rp	411.885.354.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>18.094.628.000,00</u>	
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp		429.979.982.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan:

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp	74.517.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>743.616.061,00</u>	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp		75.260.616.061,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp	16.821.496.700,00	
2) Bertambah	Rp	<u>1.396.270.000,00</u>	
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp		18.217.766.700,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1) Semula	Rp	10.172.632.059,00	
2) Bertambah	Rp	<u>3.324.826.932,00</u>	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp		13.497.458.991,00

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1) Semula	Rp	133.709.984.097,00	
2) Bertambah	Rp	<u>8.506.777.995,00</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp		142.216.762.092,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula	Rp	39.911.600.000,00	
2) Bertambah		<u>918.180.000,00</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan	Rp		40.829.780.000,00



b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp 817.365.659.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 0,00</u>

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp 817.365.659.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp 266.214.951.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 0,00</u>

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp 266.214.951.000,00

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdiri dari Jenis Pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula	Rp 89.776.658.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 18.144.668.000,00</u>

Jumlah Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp 107.921.326.000,00

b. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula	Rp 35.786.840.000,00
2) Berkurang	<u>Rp (7.111.840.000,00)</u>

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp 28.675.000.000,00

c. Pendapatan Dana Desa

1) Semula	Rp 192.327.469.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 0,00</u>

Jumlah Pendapatan Dana Desa setelah Perubahan Rp 192.327.469.000,00

d. Pendapatan Dana BOS

1) Semula	Rp 69.433.400.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 7.061.800.000,00</u>

Jumlah Pendapatan Dana BOS setelah Perubahan Rp 76.495.200.000,00

e. Pendapatan Dana Insentif Daerah

1) Semula	Rp 24.560.987.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 0,00</u>

Jumlah Pendapatan Dana BOS setelah Perubahan Rp 24.560.987.000,00



Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp 1.125.970.362.300,00

2) Berkurang Rp (6.007.253.258,00)

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah

Perubahan

Rp 1.119.963.109.042,00

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp 695.495.996.156,00

2) Bertambah Rp 84.681.347.835,58

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp 780.177.343.991,58

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah

1) Semula Rp 694.826.521.151,33

2) Berkurang Rp (8.169.087.744,33)

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 686.657.433.407,00

b. Belanja Hibah

1) Semula Rp 61.594.410.000,00

2) Bertambah Rp 3.413.346.000,00

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp 65.007.756.000,00

c. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp 40.362.100.000,00

2) Bertambah Rp 162.500.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah

Perubahan

Rp 40.524.600.000,00

d. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

1) Semula Rp 8.426.406.392,00

2) Bertambah Rp 0.00

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah

Perubahan

Rp 8.426.406.392,00

e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

1) Semula Rp 318.760.924.756,67

2) Berkurang Rp (1.414.011.513,67)

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah

Perubahan

Rp 317.346.913.243,00





f. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp	2.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp	2.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp	82.235.743.550,00
2) Bertambah	Rp	<u>18.632.793.710,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp	100.868.537.260,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp	401.363.913.041,00
2) Bertambah	Rp	<u>4.993.704.570,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp	406.357.617.611,00

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp	211.896.339.565,00
2) Bertambah	Rp	<u>61.054.849.555,58</u>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp	272.951.189.120,58

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula	Rp	55.867.681.600,00
2) Bertambah	Rp	<u>45.879.377.355,58</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp	101.747.058.955,58

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula	Rp	5.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>189.581.766,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp	5.189.581.766,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan:

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya

1) Semula	Rp	55.867.681.600,00
2) Bertambah	Rp	<u>45.879.377.355,58</u>
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp	101.747.058.955,58



(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan:

a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah  
Rp 5.000.000.000,00

1) Semula Rp 5.000.000.000,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan Rp 5.000.000.000,00

b. Pembayaran utang Kepada Pihak Ketiga Rp 189.581.766,00

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 189.581.766,00

Jumlah pembayaran pokok utang setelah Perubahan Rp 189.581.766,00

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri atas:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Organisasi dan Pemerintahan Daerah;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali di Tahun ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat. Bupati dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (2) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. Bukan merupakan kegiatan normal dan aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. Tidak diharapkan terjadi berulang;
  - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan



- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Kriteria keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat; dan
  - Adanya kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi yang berimplikasi pada beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan.

#### Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2019 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

#### Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 5 November 2019

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang  
pada tanggal 5 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2019 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG, PROVINSI JAWA TENGAH: (9-338/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

AGUS JAELANI MURSIDI, SH., M.Hum

Pembina Tingkat I

NIP. 19650803 199210 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	<b>PENDAPATAN</b>	1.770.598.676.856,00	1.803.582.975.844,00	32.984.298.988,00	1,86
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	235.221.112.856,00	249.192.603.844,00	13.971.490.988,00	5,94
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	74.517.000.000,00	75.260.616.061,00	743.616.061,00	1,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	16.821.496.700,00	18.217.766.700,00	1.396.270.000,00	8,30
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.172.632.059,00	13.497.458.991,00	3.324.826.932,00	32,68
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	133.709.984.097,00	142.216.762.092,00	8.506.777.995,00	6,36
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	1.123.492.210.000,00	1.124.410.390.000,00	918.180.000,00	0,08
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	39.911.600.000,00	40.829.780.000,00	918.180.000,00	2,30
1.2.2	Dana Alokasi Umum	817.365.659.000,00	817.365.659.000,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	266.214.951.000,00	266.214.951.000,00	0,00	0,00
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	411.885.354.000,00	429.979.982.000,00	18.094.628.000,00	4,39
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	89.776.658.000,00	107.921.326.000,00	18.144.668.000,00	20,21
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	35.786.840.000,00	28.675.000.000,00	(7.111.840.000,00)	(19,87)
1.3.6	Dana Desa	192.327.469.000,00	192.327.469.000,00	0,00	0,00
1.3.7	Dana BOS	69.433.400.000,00	76.495.200.000,00	7.061.800.000,00	10,17
1.3.9	Dana Insentif Daerah (DID)	24.560.987.000,00	24.560.987.000,00	0,00	0,00
2	<b>BELANJA</b>	1.821.466.358.456,00	1.900.140.453.033,58	78.674.094.577,58	4,32
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	1.125.970.362.300,00	1.119.963.109.042,00	(6.007.253.258,00)	(0,53)
2.1.1	Belanja Pegawai	694.826.521.151,33	686.657.433.407,00	(8.169.087.744,33)	(1,18)
2.1.4	Belanja Hibah	61.594.410.000,00	65.047.756.000,00	3.453.346.000,00	5,61
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	40.362.100.000,00	40.484.600.000,00	122.500.000,00	0,30
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	8.426.406.392,00	8.426.406.392,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	318.760.924.756,67	317.346.913.243,00	(1.414.011.513,67)	(0,44)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	695.495.996.156,00	780.177.343.991,58	84.681.347.835,58	12,18
2.2.1	Belanja Pegawai	82.235.743.550,00	100.856.872.260,00	18.621.128.710,00	22,64
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	406.363.913.041,00	406.367.932.611,00	5.004.019.570,00	1,25



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2 . 2 . 3	Belanja Modal	211.896.339.565,00	272.952.539.120,58	61.056.199.555,58	28,81
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(50.867.681.600,00)	(96.557.477.189,58)	(45.689.795.589,58)	89,82
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
3 . 1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	55.867.681.600,00	101.747.058.955,58	45.879.377.355,58	82,12
3 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	55.867.681.600,00	101.747.058.955,58	45.879.377.355,58	82,12
3 . 2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	5.000.000.000,00	5.189.581.766,00	189.581.766,00	3,79
3 . 2 . 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00
3 . 2 . 5	Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga	0,00	189.581.766,00	189.581.766,00	0,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	50.867.681.600,00	96.557.477.189,58	45.689.795.589,58	89,82
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

BATANG, 5 Nopember 2019  
BUPATI BATANG

ttd  
WIHAJI



LAMPIRAN II  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
 NOMOR 9 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**  
 TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PENDAPATAN				BELANJA							
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
						TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 12 - 9	14
1	<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>	121.022.914.300,00	128.384.908.356,00	7.361.994.056,00	6,08	523.563.857.460,00	501.258.434.181,00	1.024.822.291.641,00	525.727.562.226,00	589.430.843.372,58	1.115.158.405.598,58	90.336.113.957,58	8,81
1.01	<b>Pendidikan</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	412.659.179.871,00	153.933.706.428,00	566.592.886.299,00	416.421.834.734,00	167.193.407.990,00	583.615.242.724,00	17.022.356.425,00	3,00
1.01 . 1.01.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	412.659.179.871,00	153.151.669.128,00	565.810.848.999,00	416.421.834.734,00	166.411.370.690,00	582.833.205.424,00	17.022.356.425,00	3,01
1.01 . 2.17.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782.037.300,00	782.037.300,00	0,00	782.037.300,00	782.037.300,00	0,00	0,00
1.02	<b>Kesehatan</b>	120.479.914.300,00	127.841.908.356,00	7.361.994.056,00	6,11	87.641.085.629,00	218.690.370.185,00	306.331.455.814,00	87.364.872.777,00	252.355.840.963,00	339.720.713.740,00	33.389.257.926,00	10,90
1.02 . 1.02.01	DINAS KESEHATAN	32.479.914.300,00	37.341.908.356,00	4.861.994.056,00	14,97	59.675.005.642,00	91.133.156.300,00	150.808.161.942,00	59.843.747.074,00	126.340.198.510,00	186.183.945.584,00	35.375.783.642,00	23,46
1.02 . 1.02.02	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG	81.000.000.000,00	81.000.000.000,00	0,00	0,00	24.622.915.749,00	100.739.116.400,00	125.362.032.149,00	24.002.708.328,00	99.563.191.724,00	123.565.900.052,00	(1.796.132.097,00)	(1,43)
1.02 . 1.02.03	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIMPUNG	7.000.000.000,00	9.500.000.000,00	2.500.000.000,00	35,71	3.343.164.238,00	26.818.097.485,00	30.161.261.723,00	3.518.417.375,00	26.452.450.729,00	29.970.868.104,00	(190.393.619,00)	(0,63)
1.03	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	543.000.000,00	543.000.000,00	0,00	0,00	11.147.235.156,00	103.466.468.760,00	114.613.703.916,00	11.004.383.055,00	143.145.405.065,58	154.149.788.120,58	39.536.084.204,58	34,50
1.03 . 1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	543.000.000,00	543.000.000,00	0,00	0,00	11.147.235.156,00	103.466.468.760,00	114.613.703.916,00	11.004.383.055,00	140.697.356.865,58	151.701.739.920,58	37.088.036.004,58	32,36
1.03 . 4.01.11	KECAMATAN BATANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448.048.200,00	2.448.048.200,00	2.448.048.200,00	0,00
1.04	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	3.051.993.890,00	16.365.434.510,00	19.417.428.400,00	2.481.031.151,00	17.360.396.820,00	19.841.427.971,00	423.999.571,00	2,18
1.04 . 1.04.01	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0,00	0,00	0,00	0,00	3.051.993.890,00	16.365.434.510,00	19.417.428.400,00	2.481.031.151,00	17.360.396.820,00	19.841.427.971,00	423.999.571,00	2,18
1.05	<b>Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	6.886.818.553,00	2.568.177.500,00	9.454.996.053,00	6.512.058.836,00	3.008.727.500,00	9.520.786.336,00	65.790.283,00	0,70
1.05 . 1.05.01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700.128.386,00	1.362.785.500,00	6.062.913.886,00	4.511.496.032,00	1.587.785.500,00	6.099.281.532,00	36.367.646,00	0,60
1.05 . 1.05.02	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084.559.116,00	1.019.392.000,00	2.103.951.116,00	853.330.145,00	1.234.942.000,00	2.088.272.145,00	(15.678.971,00)	(0,75)
1.05 . 1.05.03	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102.131.051,00	0,00	1.102.131.051,00	1.147.232.659,00	0,00	1.147.232.659,00	45.101.608,00	4,09
1.05 . 4.01.03	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000.000,00	186.000.000,00	0,00	186.000.000,00	186.000.000,00	0,00	0,00
1.06	<b>Sosial</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177.544.361,00	6.234.276.798,00	8.411.821.159,00	1.943.381.673,00	6.367.065.034,00	8.310.446.707,00	(101.374.452,00)	(1,21)
1.06 . 1.05.01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466.495.000,00	1.466.495.000,00	0,00	1.571.495.000,00	1.571.495.000,00	105.000.000,00	7,16
1.06 . 1.05.03	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.366.800,00	627.366.800,00	0,00	654.366.800,00	654.366.800,00	27.000.000,00	4,30
1.06 . 1.06.01	DINAS SOSIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177.544.361,00	1.967.414.998,00	4.144.959.359,00	1.943.381.673,00	1.967.414.998,00	3.910.796.671,00	(234.162.688,00)	(5,65)
1.06 . 4.01.03	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173.000.000,00	2.173.000.000,00	0,00	2.173.788.236,00	2.173.788.236,00	788.236,00	0,04
2	<b>Urusan Wajib Tidak Pelayanan Dasar</b>	4.000.435.200,00	4.184.705.200,00	184.270.000,00	4,61	41.246.114.984,00	81.973.666.571,00	123.219.781.555,00	37.868.177.985,00	76.528.733.915,00	114.396.911.900,00	(8.822.869.655,00)	(7,16)
2.01	<b>Tenaga Kerja</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	2.726.385.569,00	2.633.646.000,00	5.360.031.569,00	1.898.287.263,00	2.833.646.000,00	4.731.933.263,00	(628.098.306,00)	(11,72)
2.01 . 01.01	DINAS KETENAGAKERJAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	2.726.385.569,00	2.633.646.000,00	5.360.031.569,00	1.898.287.263,00	2.833.646.000,00	4.731.933.263,00	(628.098.306,00)	(11,72)
2.02	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892.643.296,00	2.580.452.100,00	4.473.095.296,00	2.945.054.552,00	1.611.302.000,00	4.556.956.552,00	83.861.256,00	1,87
2.02 . 02.01	DINAS PEMERINTAHAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK DAN KEMASYARAKATAN BERPENDIDIKAN DAN KEHIDUPAN	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892.643.296,00	2.580.452.100,00	4.473.095.296,00	2.945.054.552,00	1.611.302.000,00	4.506.956.642,00	83.861.256,00	1,90
2.02 . 4.01.15	KECAMATAN BANDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
2.02 . 4.01.20	KECAMATAN GRIPHSING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.999.900,00	24.999.900,00	0,00	24.999.900,00	24.999.900,00	0,00	0,00



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PENDAPATAN				BELANJA							
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	6	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
						TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 12 - 9	14
2.03	Pangan	375.000.000,00	375.000.000,00	0,00	0,00	9.814.606.935,00	1.932.236.779,00	11.746.843.714,00	9.207.707.030,00	1.932.236.779,00	11.139.943.809,00	(606.899.905,00)	(5,17)
2.03 . 2.03.01	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	375.000.000,00	375.000.000,00	0,00	0,00	9.814.606.935,00	1.932.236.779,00	11.746.843.714,00	9.207.707.030,00	1.932.236.779,00	11.139.943.809,00	(606.899.905,00)	(5,17)
2.04	Pertanahan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.122.000,00	125.122.000,00	0,00	369.408.734,00	369.408.734,00	244.286.734,00	195,24
2.04 . 4.01.03	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.122.000,00	125.122.000,00	0,00	369.408.734,00	369.408.734,00	244.286.734,00	195,24
2.05	Lingkungan Hidup	150.000.000,00	155.000.000,00	5.000.000,00	3,33	5.025.837.372,00	6.493.718.019,00	11.519.555.391,00	4.865.584.177,00	7.706.419.019,00	12.572.003.196,00	1.052.447.805,00	9,14
2.05 . 2.05.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	150.000.000,00	155.000.000,00	5.000.000,00	3,33	5.025.837.372,00	6.493.718.019,00	11.519.555.391,00	4.865.584.177,00	7.706.419.019,00	12.572.003.196,00	1.052.447.805,00	9,14
2.06	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	4.010.845.283,00	3.512.474.716,00	7.523.319.999,00	3.300.044.910,00	3.594.094.625,00	6.894.139.535,00	(629.180.464,00)	(8,36)
2.06 . 2.06.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.010.845.283,00	3.512.474.716,00	7.523.319.999,00	3.300.044.910,00	3.594.094.625,00	6.894.139.535,00	(629.180.464,00)	(8,36)
2.07	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760.177.000,00	4.680.863.900,00	7.441.040.900,00	2.670.057.117,00	4.770.217.700,00	7.440.274.817,00	(766.083,00)	(0,01)
2.07 . 2.07.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760.177.000,00	3.623.763.900,00	6.383.940.900,00	2.670.057.117,00	2.531.923.900,00	5.201.981.017,00	(1.181.959.883,00)	(18,51)
2.07 . 4.01.11	KECAMATAN BATANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.332.500,00	714.332.500,00	0,00	1.896.926.300,00	1.896.926.300,00	1.182.593.800,00	165,55
2.07 . 4.01.12	KECAMATAN TULIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
2.07 . 4.01.13	KECAMATAN WARUNGASEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00
2.07 . 4.01.14	KECAMATAN WONOTUNGGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
2.07 . 4.01.16	KECAMATAN BLADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
2.07 . 4.01.17	KECAMATAN REBAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
2.07 . 4.01.18	KECAMATAN KANDEMAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
2.07 . 4.01.19	KECAMATAN TERSONO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
2.07 . 4.01.21	KECAMATAN SUBAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	0,00
2.07 . 4.01.22	KECAMATAN LIMPUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.267.500,00	41.267.500,00	0,00	41.267.500,00	41.267.500,00	0,00	0,00
2.07 . 4.01.23	KECAMATAN BANYUPUTIH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	23.600.000,00	23.600.000,00	(1.400.000,00)	(5,60)
2.07 . 4.01.24	KECAMATAN PECALUNGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
2.07 . 4.01.25	KECAMATAN BAWANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.991.408.700,00	6.991.408.700,00	0,00	7.305.134.862,00	7.305.134.862,00	313.726.162,00	4,49
2.08 . 2.02.01	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.991.408.700,00	6.991.408.700,00	0,00	7.305.134.862,00	7.305.134.862,00	313.726.162,00	4,49
2.09	Perhubungan	2.300.822.200,00	2.305.092.200,00	4.270.000,00	0,19	4.670.667.630,00	33.106.716.657,00	37.777.384.287,00	4.402.678.354,00	23.598.103.896,00	28.000.782.250,00	(9.776.602.037,00)	(25,88)
2.09 . 2.09.01	DINAS PERHUBUNGAN	2.300.822.200,00	2.305.092.200,00	4.270.000,00	0,19	4.670.667.630,00	33.106.716.657,00	37.777.384.287,00	4.402.678.354,00	23.598.103.896,00	28.000.782.250,00	(9.776.602.037,00)	(25,88)
2.10	Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.730.701,00	8.039.041.750,00	10.889.772.451,00	3.051.779.764,00	8.556.691.750,00	11.608.471.514,00	718.699.063,00	6,60
2.10 . 2.10.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.730.701,00	6.886.743.750,00	9.737.474.451,00	3.051.779.764,00	7.000.043.750,00	10.051.823.514,00	314.349.063,00	3,23
2.10 . 4.01.03	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152.298.000,00	1.152.298.000,00	0,00	1.556.648.000,00	1.556.648.000,00	404.350.000,00	35,09
2.11	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000.000,00	460.000.000,00	0,00	460.000.000,00	460.000.000,00	0,00	0,00
2.11 . 3.06.01	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000.000,00	380.000.000,00	0,00	380.000.000,00	380.000.000,00	0,00	0,00
2.11 . 4.01.03	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00
2.12	Penanaman Modal	1.174.613.000,00	1.349.613.000,00	175.000.000,00	14,90	3.410.103.503,00	2.832.001.920,00	6.242.105.423,00	2.522.539.339,00	3.618.684.420,00	6.141.223.759,00	100.881.664,00	(1,62)
2.12 . 2.12.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU DUA	1.174.613.000,00	1.349.613.000,00	175.000.000,00	14,90	3.410.103.503,00	1.853.231.920,00	5.263.335.423,00	2.522.539.339,00	2.639.914.420,00	5.162.453.759,00	100.881.664,00	(1,92)
2.12 . 4.01.03	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978.770.000,00	978.770.000,00	0,00	978.770.000,00	978.770.000,00	0,00	0,00
2.13	Keperawatan dan Olah Raga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.572.673.750,00	3.572.673.750,00	0,00	4.002.673.750,00	4.002.673.750,00	430.000.000,00	12,04
2.13 . 3.02.01	DINAS PARAWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.572.673.750,00	3.572.673.750,00	0,00	4.002.673.750,00	4.002.673.750,00	430.000.000,00	12,04
2.14	Statistik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PENDAPATAN				BELANJA							
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				3	4	5 = 4 - 3	6	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 12 - 9	14
2.14 . 2.10.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00
2.16	<b>Kebudayaan</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247.315.000,00	2.247.315.000,00	0,00	2.363.525.000,00	2.363.525.000,00	116.210.000,00	5,17
2.16 . 1.01.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232.315.000,00	2.232.315.000,00	0,00	2.348.525.000,00	2.348.525.000,00	116.210.000,00	5,21
2.16 . 2.07.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
2.17	<b>Perpustakaan</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	3.084.117.695,00	2.854.295.380,00	5.938.413.075,00	3.004.445.479,00	2.912.295.380,00	5.916.740.859,00	(21.672.216,00)	(0,36)
2.17 . 2.17.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0,00	0,00	0,00	0,00	3.084.117.695,00	2.854.295.380,00	5.938.413.075,00	3.004.445.479,00	2.912.295.380,00	5.916.740.859,00	(21.672.216,00)	(0,36)
2.18	<b>Kearsipan</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.700.000,00	461.700.000,00	0,00	443.700.000,00	443.700.000,00	(18.000.000,00)	(3,90)
2.18 . 2.17.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.700.000,00	461.700.000,00	0,00	443.700.000,00	443.700.000,00	(18.000.000,00)	(3,90)
3	<b>Urusan Pilihan</b>	11.258.841.500,00	12.358.841.500,00	1.100.000.000,00	9,77	16.907.482.191,00	34.076.567.962,00	50.984.050.153,00	15.575.958.744,00	26.063.234.462,00	41.639.193.206,00	(9.344.856.947,00)	(18,33)
3.01	<b>Kelautan dan Perikanan</b>	5.160.250.000,00	5.160.250.000,00	0,00	0,00	5.260.721.116,00	14.219.379.893,00	19.480.101.009,00	4.539.958.313,00	4.615.379.893,00	9.155.338.206,00	(10.324.762.803,00)	(53,00)
3.01 . 3.01.01	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, DAN PETERNAKAN	5.160.250.000,00	5.160.250.000,00	0,00	0,00	5.260.721.116,00	14.219.379.893,00	19.480.101.009,00	4.539.958.313,00	4.615.379.893,00	9.155.338.206,00	(10.324.762.803,00)	(53,00)
3.02	<b>Pariwisata</b>	2.850.000.000,00	2.850.000.000,00	0,00	0,00	3.466.626.908,00	7.489.928.500,00	10.956.555.408,00	3.347.124.697,00	8.609.928.500,00	11.957.053.197,00	1.000.497.789,00	9,13
3.02 . 3.02.01	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	2.850.000.000,00	2.850.000.000,00	0,00	0,00	3.466.626.908,00	7.489.928.500,00	10.956.555.408,00	3.347.124.697,00	8.609.928.500,00	11.957.053.197,00	1.000.497.789,00	9,13
3.03	<b>Pertanian</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.676.865.070,00	8.676.865.070,00	0,00	8.680.215.070,00	8.680.215.070,00	3.350.000,00	0,04
3.03 . 2.03.01	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.114.231.000,00	6.114.231.000,00	0,00	6.143.581.000,00	6.143.581.000,00	29.350.000,00	0,48
3.03 . 3.01.01	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, DAN PETERNAKAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562.634.070,00	2.562.634.070,00	0,00	2.536.634.070,00	2.536.634.070,00	(26.000.000,00)	(1,01)
3.04	<b>Kehutanan</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00
3.04 . 2.05.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00
3.06	<b>Perdagangan</b>	3.248.591.500,00	4.348.591.500,00	1.100.000.000,00	33,86	8.180.134.167,00	2.321.572.000,00	10.501.706.167,00	7.688.875.734,00	2.333.746.000,00	10.022.621.734,00	(479.084.433,00)	(4,56)
3.06 . 3.06.01	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN LUKM	3.248.591.500,00	4.348.591.500,00	1.100.000.000,00	33,86	8.180.134.167,00	2.321.572.000,00	10.501.706.167,00	7.688.875.734,00	2.333.746.000,00	10.022.621.734,00	(479.084.433,00)	(4,56)
3.07	<b>Perindustrian</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251.822.499,00	1.251.822.499,00	0,00	1.706.964.999,00	1.706.964.999,00	455.142.500,00	36,36
3.07 . 3.06.01	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN LUKM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251.822.499,00	1.251.822.499,00	0,00	1.706.964.999,00	1.706.964.999,00	455.142.500,00	36,36
3.08	<b>Transmigrasi</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	0,00
3.08 . 2.01.01	DINAS KETENAGAKERJAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	0,00
4	<b>Urusan Penunjang / Pemerintahan</b>	1.634.316.485.856,00	1.658.654.520.788,00	24.338.034.932,00	1,49	544.252.907.665,00	78.187.327.442,00	622.440.235.107,00	540.791.410.087,00	88.154.532.242,00	628.945.942.329,00	6.505.707.222,00	1,05
4.01	<b>Administrasi Pemerintahan</b>	10.168.632.059,00	13.493.858.991,00	3.325.226.932,00	32,70	66.075.490.301,81	42.419.584.501,00	108.495.074.802,81	64.352.476.574,00	45.761.525.801,00	110.114.002.375,00	1.618.927.572,19	1,49
4.01 . 1.05.02	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4.01.01	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	20.676.855.000,00	0,00	20.676.855.000,00	20.462.000.000,00	0,00	20.462.000.000,00	(214.855.000,00)	(1,04)
4.01 . 4.01.02	BUPATI dan WAKIL BUPATI	0,00	0,00	0,00	0,00	774.316.356,00	0,00	774.316.356,00	769.344.497,00	0,00	769.344.497,00	(4.971.859,00)	(0,64)
4.01 . 4.01.03	SEKRETARIAT DAERAH	10.168.632.059,00	13.493.858.991,00	3.325.226.932,00	32,70	11.510.422.239,00	14.812.080.214,00	26.322.502.453,00	11.309.967.636,00	17.127.208.514,00	28.437.176.150,00	2.114.673.697,00	8,03
4.01 . 4.01.04	SEKRETARIAT DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	3.269.914.146,00	19.347.143.287,00	22.617.057.433,00	3.177.844.393,00	23.662.143.287,00	26.839.987.680,00	4.222.930.247,00	18,67
4.01 . 4.01.11	KECAMATAN BATANG	0,00	0,00	0,00	0,00	8.134.104.880,00	4.236.325.830,00	12.370.430.710,00	7.962.973.808,00	937.483.830,00	8.900.457.638,00	(3.469.973.072,00)	(28,05)
4.01 . 4.01.12	KECAMATAN TULIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587.950.998,00	271.349.846,00	1.859.300.844,00	1.642.186.166,00	269.649.846,00	1.911.836.012,00	52.535.168,00	2,83
4.01 . 4.01.13	KECAMATAN WARUNGASEM	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492.384.933,00	270.500.000,00	1.762.884.933,00	1.497.924.713,00	270.500.000,00	1.678.424.713,00	(84.460.220,00)	(4,78)
4.01 . 4.01.14	KECAMATAN WONOTUNGGA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491.127.377,00	292.250.000,00	1.783.377.377,00	1.305.729.355,00	292.250.000,00	1.597.979.355,00	(185.398.022,00)	(10,40)
4.01 . 4.01.15	KECAMATAN BANDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922.024.172,00	289.175.000,00	2.211.199.172,00	1.967.397.848,00	289.475.000,00	2.156.872.848,00	(54.626.324,00)	(2,47)
4.01 . 4.01.16	KECAMATAN BLADO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620.587.086,00	303.450.000,00	1.924.037.086,00	1.386.773.522,00	303.450.000,00	1.890.223.522,00	(33.813.564,00)	(1,76)
4.01 . 4.01.17	KECAMATAN REBAN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652.744.341,81	326.750.000,00	1.979.494.341,81	1.570.699.304,00	326.750.000,00	1.897.449.304,00	(82.045.037,81)	(4,14)
4.01 . 4.01.18	KECAMATAN KANDHUMAN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346.737.231,00	254.937.000,00	1.601.674.231,00	1.340.453.271,00	257.892.000,00	1.718.345.271,00	(183.328.940,00)	(11,44)





URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PENDAPATAN				BELANJA							
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				5 = 4 - 3	6	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA	13 = 12 - 9	14
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 12 - 9	14
4.01.4.01.19	KECAMATAN TERSONO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526.128.312,00	301.250.000,00	1.827.378.312,00	1.534.046.175,00	301.250.000,00	1.835.296.175,00	7.917.863,00	0,43
4.01.4.01.20	KECAMATAN GRINGSING	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492.572.793,00	292.749.000,00	1.785.321.793,00	1.495.901.485,00	292.749.000,00	1.788.650.485,00	3.328.692,00	0,19
4.01.4.01.21	KECAMATAN SUBAH	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492.413.911,00	281.750.000,00	1.774.163.911,00	1.417.679.120,00	281.750.000,00	1.699.429.120,00	(74.734.791,00)	(4,21)
4.01.4.01.22	KECAMATAN LIMPUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359.324.363,00	278.587.500,00	1.637.911.863,00	1.191.296.214,00	286.587.500,00	1.477.883.714,00	(160.028.149,00)	(9,77)
4.01.4.01.23	KECAMATAN BANYUPUTIH	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419.378.192,00	272.000.000,00	1.691.378.192,00	1.404.319.868,00	273.400.000,00	1.677.719.868,00	(13.658.324,00)	(0,81)
4.01.4.01.24	KECAMATAN PECALUNGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457.753.222,00	276.700.000,00	1.734.453.222,00	1.263.503.578,00	276.700.000,00	1.540.203.578,00	(194.249.644,00)	(11,20)
4.01.4.01.25	KECAMATAN BAWANG	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548.750.764,00	312.286.824,00	1.861.037.588,00	1.522.435.621,00	312.286.824,00	1.834.722.445,00	(26.315.143,00)	(1,41)
4.02	<b>Pengawasan</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	6.087.489.217,00	2.960.695.500,00	9.048.184.717,00	5.126.665.659,00	4.710.695.500,00	9.837.361.159,00	789.176.442,00	8,72
4.02.4.01.03	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.383.000,00	77.383.000,00	0,00	77.383.000,00	77.383.000,00	0,00	0,00
4.02.4.02.01	INSPEKTORAT DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	6.087.489.217,00	2.883.312.500,00	8.970.801.717,00	5.126.665.659,00	4.633.312.500,00	9.759.978.159,00	789.176.442,00	8,80
4.03	<b>Perencanaan</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620.448.237,00	4.398.914.158,00	8.019.362.395,00	3.450.885.664,00	4.442.659.158,00	7.893.544.822,00	(125.817.573,00)	(1,57)
4.03.4.01.03	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.750.000,00	520.750.000,00	0,00	520.750.000,00	520.750.000,00	0,00	0,00
4.03.4.01.11	KECAMATAN BATANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.370.000,00	16.370.000,00	0,00	16.370.000,00	16.370.000,00	0,00	0,00
4.03.4.01.12	KECAMATAN TULIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400.000,00	22.400.000,00	0,00	24.100.000,00	24.100.000,00	1.700.000,00	7,59
4.03.4.01.13	KECAMATAN WARUNGASEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00
4.03.4.01.14	KECAMATAN WONOTUNGGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00
4.03.4.01.15	KECAMATAN BANDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
4.03.4.01.16	KECAMATAN BLADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00
4.03.4.01.17	KECAMATAN REBAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
4.03.4.01.18	KECAMATAN KANDEMAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.772.500,00	23.772.500,00	0,00	20.817.500,00	20.817.500,00	(2.955.000,00)	(12,43)
4.03.4.01.19	KECAMATAN TERSONO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
4.03.4.01.20	KECAMATAN GRINGSING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00
4.03.4.01.21	KECAMATAN SUBAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00
4.03.4.01.22	KECAMATAN LIMPUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.645.000,00	17.645.000,00	0,00	17.645.000,00	17.645.000,00	0,00	0,00
4.03.4.01.23	KECAMATAN BANYUPUTIH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00
4.03.4.01.24	KECAMATAN PECALUNGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00
4.03.4.01.25	KECAMATAN BAWANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
4.03.4.03.01	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620.448.237,00	3.619.176.658,00	7.239.624.895,00	3.450.885.664,00	3.664.176.658,00	7.115.062.322,00	(124.562.573,00)	(1,72)
4.04	<b>Keuangan</b>	1.624.147.853.797,00	1.645.160.661.797,00	21.012.808.000,00	1,29	465.171.142.757,19	24.014.403.660,00	489.185.546.417,19	464.681.639.224,00	25.152.338.160,00	489.833.977.384,00	648.430.966,81	0,13
4.04.4.01.03	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000.000,00	187.000.000,00	0,00	188.250.000,00	188.250.000,00	1.250.000,00	0,67
4.04.4.01.20	KECAMATAN GRINGSING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00
4.04.4.04.01	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	88.770.289.797,00	90.770.289.797,00	2.000.000.000,00	2,25	34.027.301.608,52	23.813.903.660,00	57.841.205.268,52	31.375.963.589,00	24.950.588.160,00	56.326.551.749,00	(1.514.653.519,52)	(2,62)
4.04.4.04.02	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH (DPKD)	1.535.377.564.000,00	1.554.390.372.000,00	19.012.808.000,00	1,24	431.143.841.148,67	0,00	431.143.841.148,67	433.305.675.635,00	0,00	433.305.675.635,00	2.161.834.486,33	0,50
4.05	<b>Kepegawaian</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298.337.152,00	3.703.579.623,00	7.001.916.775,00	3.179.742.966,00	7.397.163.623,00	10.576.906.589,00	3.574.989.814,00	51,06
4.05.4.01.03	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	183.100.000,00	183.100.000,00	(6.900.000,00)	(3,63)
4.05.4.05.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298.337.152,00	3.513.579.623,00	6.811.916.775,00	3.179.742.966,00	7.214.063.623,00	10.793.806.589,00	3.581.889.814,00	51,58
4.06	<b>Pendidikan dan Pelatihan</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
4.06.4.01.25	KECAMATAN BAWANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
4.07	<b>Penelitian dan Pengembangan</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.150.000,00	675.150.000,00	0,00	675.150.000,00	675.150.000,00	0,00	0,00



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PENDAPATAN				BELANJA							
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				5 = 4 - 3	6	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA	13 = 12 - 9	14
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 12 - 9	14
4.07 . 4.03.01	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.150.000,00	675.150.000,00	0,00	675.150.000,00	675.150.000,00	0,00	0,00
		1.770.598.676.856,00	1.803.582.975.844,00	32.984.298.988,00	1,86	1.125.970.362.300,00	695.495.996.156,00	1.821.466.358.456,00	1.119.963.109.042,00	780.177.343.991,58	1.900.140.453.033,58	78.674.094.577,58	4,32

Batang, 5 Nopember 2019

BUPATI BATANG

ttd

WIHAJI



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,**  
**PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
 TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4.05      Urusan Penunjang / Pemerintahan Kepegawaian  
 Organisasi : 4.05.01      BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05.4.05.01.00.00.5	<b>BELANJA</b>	6.811.916.775,00	10.393.806.589,00	3.581.889.814,00	52,58	PP Nomor 70 Tahun 2015
4.05.4.05.01.00.00.5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	3.298.337.152,00	3.179.742.966,00	(118.594.186,00)	(3,60)	
4.05.4.05.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	3.298.337.152,00	3.179.742.966,00	(118.594.186,00)	(3,60)	
4.05.4.05.01.01.01.5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	3.513.579.623,00	7.214.063.623,00	3.700.484.000,00	105,32	
4.05.4.05.01.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	490.706.800,00	710.063.800,00	219.357.000,00	44,70	
4.05.4.05.01.01.01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	1.255.000,00	1.255.000,00	0,00	0,00	
4.05.4.05.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.255.000,00	1.255.000,00	0,00	0,00	
4.05.4.05.01.01.02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	116.400.000,00	150.000.000,00	33.600.000,00	28,87	
4.05.4.05.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	116.400.000,00	150.000.000,00	33.600.000,00	28,87	
4.05.4.05.01.01.03	<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.05.4.05.01.01.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.05.4.05.01.01.04	<i>Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS</i>	13.418.800,00	13.418.800,00	0,00	0,00	
4.05.4.05.01.01.04.5.2.1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.05.4.05.01.01.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.418.800,00	1.418.800,00	0,00	0,00	
4.05.4.05.01.01.06	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional</i>	33.650.000,00	42.250.000,00	8.600.000,00	25,56	
4.05.4.05.01.01.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.650.000,00	42.250.000,00	8.600.000,00	25,56	
4.05.4.05.01.01.08	<i>Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</i>	30.705.000,00	33.705.000,00	3.000.000,00	9,77	
4.05.4.05.01.01.08.5.2.1	Belanja Pegawai	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
4.05.4.05.01.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.305.000,00	33.305.000,00	3.000.000,00	9,90	
4.05.4.05.01.01.10	<i>Penyediaan Alat Tulis Kantor</i>	23.644.800,00	23.644.800,00	0,00	0,00	
4.05.4.05.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.644.800,00	23.644.800,00	0,00	0,00	
4.05.4.05.01.01.11	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	14.250.200,00	17.250.200,00	3.000.000,00	21,05	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.250.200,00	17.250.200,00	3.000.000,00	21,05	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 12	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	3.740.000,00	33.740.000,00	30.000.000,00	802,14	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.740.000,00	33.740.000,00	30.000.000,00	802,14	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 13	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	44.250.000,00	44.250.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 15	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 17	<i>Penyediaan Makanan dan Minuman</i>	111.425.000,00	191.425.000,00	80.000.000,00	71,80	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	111.425.000,00	191.425.000,00	80.000.000,00	71,80	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 18	<i>Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah</i>	41.250.000,00	101.650.000,00	60.400.000,00	146,42	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.250.000,00	101.650.000,00	60.400.000,00	146,42	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 23	<i>Pengelolaan Keuangan SKPD</i>	37.968.000,00	38.725.000,00	757.000,00	1,99	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	37.500.000,00	37.725.000,00	225.000,00	0,60	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	468.000,00	1.000.000,00	532.000,00	113,68	
4.05 . 4.05.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	68.860.000,00	68.860.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 22	<i>Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor</i>	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 24	<i>Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional</i>	50.860.000,00	50.860.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.860.000,00	50.860.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 03	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	33.750.000,00	33.750.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 03 . 07	<i>Pembinaan Disiplin Pegawai</i>	33.750.000,00	33.750.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.950.000,00	31.950.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 04	<b>Program Fasilitasi Pindah/ Purna Tugas PNS</b>	12.888.000,00	12.888.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 04 . 04	<i>Pelatihan/Workshop Persiapan Purna Tugas</i>	12.888.000,00	12.888.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.088.000,00	10.088.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	2.570.031.102,00	4.230.685.102,00	1.660.654.000,00	64,62	



KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.01 . 05 . 02	<i>Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan</i>	12.737.250,00	12.737.250,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.437.250,00	12.437.250,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 03	<i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan</i>	14.029.852,00	14.029.852,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.729.852,00	13.729.852,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 10	<i>Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNSD</i>	2.328.522.000,00	3.989.176.000,00	1.660.654.000,00	71,32	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	6.750.000,00	750.000,00	12,50	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.322.522.000,00	3.982.426.000,00	1.659.904.000,00	71,47	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 16	<i>Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNSD</i>	31.250.000,00	31.250.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.250.000,00	31.250.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 17	<i>Diklat Teknis bagi PNSD</i>	54.780.000,00	54.780.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.780.000,00	54.780.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 29	<i>Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNSD</i>	128.712.000,00	128.712.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	128.712.000,00	128.712.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 01	<i>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 07	<b>Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah</b>	44.949.400,00	44.949.400,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 01	<i>Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah</i>	44.949.400,00	44.949.400,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.149.400,00	43.149.400,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 28	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>	279.894.321,00	2.017.867.321,00	1.737.973.000,00	620,94	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 01	<i>Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS</i>	110.489.000,00	703.122.000,00	592.633.000,00	536,37	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	75.000.000,00	231.600.000,00	156.600.000,00	208,80	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.489.000,00	471.522.000,00	436.033.000,00	1.228,64	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 02	<i>Seleksi Penerimaan Calon PNS</i>	0,00	883.340.000,00	883.340.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	296.050.000,00	296.050.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	587.290.000,00	587.290.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 03	<i>Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah</i>	58.900.000,00	258.900.000,00	200.000.000,00	339,56	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.400.000,00	27.400.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.500.000,00	38.600.000,00	7.100.000,00	22,54	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	192.900.000,00	192.900.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 05	<i>Pemberian Penghargaan Bagi PNS Yang Berprestasi</i>	9.790.063,00	9.790.063,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.990.063,00	7.990.063,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 06	<i>Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS</i>	54.583.706,00	94.583.706,00	40.000.000,00	73,28	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.750.000,00	74.250.000,00	40.500.000,00	120,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.833.706,00	20.333.706,00	(500.000,00)	(2,40)	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 12	<i>Pengembangan Aparatur</i>	20.655.000,00	20.655.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.655.000,00	20.655.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 14	<i>Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS</i>	25.476.552,00	47.476.552,00	22.000.000,00	86,35	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.676.552,00	45.676.552,00	22.000.000,00	92,92	
4.05 . 4.05.01 . 29	<b>Program Pendidikan Kedinasan</b>	7.500.000,00	90.000.000,00	82.500.000,00	1.100,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 01	<i>Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme</i>	7.500.000,00	90.000.000,00	82.500.000,00	1.100,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.000.000,00	19.900.000,00	15.900.000,00	397,50	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	70.100.000,00	66.600.000,00	1.902,86	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(6.811.916.775,00)</b>	<b>(10.393.806.589,00)</b>	<b>(3.581.889.814,00)</b>	<b>52,58</b>	

BATANG, 5 Nopember 2019  
BUPATI BATANG

ttd

WIHAJI

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG  
 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
 ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN  
 TAHUN ANGGARAN 2019



KODE REK	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		JENIS BELANJA			JUMLAH	JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	%
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	52.056.348.500,00	275.423.739.696,00	173.778.345.985,00	501.258.434.181,00	67.603.167.060,00	269.183.915.942,00	252.643.760.370,58	589.430.843.372,58	88.172.409.191,58	17,59
1.01	Pendidikan	2.820.783.200,00	131.769.201.288,00	19.343.721.940,00	153.933.706.428,00	13.899.914.923,00	103.144.962.568,00	50.148.530.499,00	167.193.407.990,00	13.259.701.562,00	8,61
1.01.1.01.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.745.634.000,00	131.210.213.188,00	19.195.821.940,00	153.151.669.128,00	13.824.765.723,00	102.585.974.468,00	50.000.630.499,00	166.411.370.690,00	13.259.701.562,00	8,66
1.01.1.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.630.100.000,00	1.977.300.000,00	0,00	3.607.400.000,00	1.615.000.000,00	2.017.284.520,00	0,00	3.632.284.520,00	24.884.520,00	0,69
1.01.1.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	35.364.000,00	0,00	35.364.000,00	0,00	35.364.000,00	0,00	35.364.000,00	0,00	0,00
1.01.1.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	437.500.000,00	0,00	437.500.000,00	0,00	437.500.000,00	0,00	437.500.000,00	0,00	0,00
1.01.1.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	0,00	311.450.000,00	0,00	311.450.000,00	0,00	311.450.000,00	0,00	311.450.000,00	0,00	0,00
1.01.1.01.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	25.200.000,00	374.836.000,00	0,00	400.036.000,00	25.200.000,00	378.210.400,00	0,00	403.410.400,00	3.374.400,00	0,84
1.01.1.01.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0,00	136.352.000,00	0,00	136.352.000,00	0,00	136.352.000,00	0,00	136.352.000,00	0,00	0,00
1.01.1.01.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	170.973.000,00	0,00	170.973.000,00	0,00	170.973.000,00	0,00	170.973.000,00	0,00	0,00
1.01.1.01.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	0,00	49.420.000,00	0,00	49.420.000,00	0,00	49.420.000,00	0,00	49.420.000,00	0,00	0,00
1.01.1.01.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0,00	49.740.000,00	0,00	49.740.000,00	0,00	49.740.000,00	0,00	49.740.000,00	0,00	0,00
1.01.1.01.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	0,00	178.767.000,00	0,00	178.767.000,00	0,00	198.367.000,00	0,00	198.367.000,00	19.600.000,00	10,96
1.01.1.01.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Di Dalam dan Ke Luar Daerah	0,00	189.948.000,00	0,00	189.948.000,00	0,00	191.858.120,00	0,00	191.858.120,00	1.910.120,00	1,01
1.01.1.01.01.01.23	Pengelolaan Keuangan SKPD	1.604.900.000,00	42.950.000,00	0,00	1.647.850.000,00	1.589.800.000,00	58.050.000,00	0,00	1.647.850.000,00	0,00	0,00
1.01.1.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	28.900.000,00	500.255.200,00	0,00	529.155.200,00	28.900.000,00	519.323.680,00	0,00	548.223.680,00	19.068.480,00	3,60
1.01.1.01.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
1.01.1.01.01.05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	1.200.000,00	52.763.200,00	0,00	53.963.200,00	1.200.000,00	52.763.200,00	0,00	53.963.200,00	0,00	0,00
1.01.1.01.01.05.06	Pembinaan Administrasi Aset	20.000.000,00	180.000.000,00	0,00	200.000.000,00	20.000.000,00	180.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00
1.01.1.01.01.05.07	Bimbingan Teknis Bendahara Sekolah	7.700.000,00	28.050.000,00	0,00	35.750.000,00	7.700.000,00	28.050.000,00	0,00	35.750.000,00	0,00	0,00
1.01.1.01.01.05.11	Kegiatan Pembinaan Kesamaptaan	0,00	224.442.000,00	0,00	224.442.000,00	0,00	243.510.480,00	0,00	243.510.480,00	19.068.480,00	8,50
1.01.1.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	248.145.000,00	31.855.000,00	0,00	280.000.000,00	248.145.000,00	31.855.000,00	0,00	280.000.000,00	0,00	0,00
1.01.1.01.01.06.01	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	68.115.000,00	1.885.000,00	0,00	70.000.000,00	68.115.000,00	1.885.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00
1.01.1.01.01.06.02	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	69.810.000,00	190.000,00	0,00	70.000.000,00	69.810.000,00	190.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00
1.01.1.01.01.06.04	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	24.820.000,00	180.000,00	0,00	25.000.000,00	24.820.000,00	180.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00
1.01.1.01.01.06.05	Kegiatan Penyusunan Laporan Evaluasi Anggaran	85.400.000,00	14.600.000,00	0,00	100.000.000,00	85.400.000,00	14.600.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00
1.01.1.01.01.06.09	Kegiatan Penyusunan LAKIP Kabupaten	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
1.01.1.01.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	121.600.000,00	2.295.560.000,00	1.147.000.000,00	3.564.160.000,00	121.600.000,00	2.497.486.000,00	1.147.000.000,00	3.766.086.000,00	201.926.000,00	5,67
1.01.1.01.01.15.07	Pembangunan Sarana dan Prasarana Bermain	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
1.01.1.01.01.15.09	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
1.01.1.01.01.15.19	Pengadaan Mebeluer Sekolah	0,00	0,00	67.000.000,00	67.000.000,00	0,00	0,00	67.000.000,00	67.000.000,00	0,00	0,00
1.01.1.01.01.15.42	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
1.01.1.01.01.15.57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik PAUD Non Formal	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	150.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00
1.01.1.01.01.15.59	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	0,00	1.772.160.000,00	380.000.000,00	2.152.160.000,00	0,00	1.974.086.000,00	380.000.000,00	2.354.086.000,00	201.926.000,00	9,38
1.01.1.01.01.15.60	Pengembangan data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00



KODE REK	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		JENIS BELANJA			JUMLAH	JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	%
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
4.05.4.05.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.200.000,00	1.800.000,00	0,00	5.000.000,00	3.200.000,00	1.800.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
4.05.4.05.01.07	<b>Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah</b>	1.800.000,00	43.149.400,00	0,00	44.949.400,00	1.800.000,00	43.149.400,00	0,00	44.949.400,00	0,00	0,00
4.05.4.05.01.07.01	Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	1.800.000,00	43.149.400,00	0,00	44.949.400,00	1.800.000,00	43.149.400,00	0,00	44.949.400,00	0,00	0,00
4.05.4.05.01.28	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>	139.750.000,00	140.144.321,00	0,00	279.894.321,00	632.900.000,00	1.192.067.321,00	192.900.000,00	2.017.867.321,00	1.737.973.000,00	620,94
4.05.4.05.01.28.01	Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS	75.000.000,00	35.489.000,00	0,00	110.489.000,00	231.600.000,00	471.522.000,00	0,00	703.122.000,00	592.633.000,00	536,37
4.05.4.05.01.28.02	Seleksi Penerimaan Calon PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	296.050.000,00	587.290.000,00	0,00	883.340.000,00	883.340.000,00	0,00
4.05.4.05.01.28.03	Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	27.400.000,00	31.500.000,00	0,00	58.900.000,00	27.400.000,00	38.600.000,00	192.900.000,00	258.900.000,00	200.000.000,00	339,56
4.05.4.05.01.28.05	Pemberian Penghargaan Bagi PNS Yang Berprestasi	1.800.000,00	7.990.063,00	0,00	9.790.063,00	1.800.000,00	7.990.063,00	0,00	9.790.063,00	0,00	0,00
4.05.4.05.01.28.06	Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	33.750.000,00	20.833.706,00	0,00	54.583.706,00	74.250.000,00	20.333.706,00	0,00	94.583.706,00	40.000.000,00	73,28
4.05.4.05.01.28.12	Pengembangan Aparatur	0,00	20.655.000,00	0,00	20.655.000,00	0,00	20.655.000,00	0,00	20.655.000,00	0,00	0,00
4.05.4.05.01.28.14	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	1.800.000,00	23.676.552,00	0,00	25.476.552,00	1.800.000,00	45.676.552,00	0,00	47.476.552,00	22.000.000,00	86,35
4.05.4.05.01.29	<b>Program Pendidikan Kedinasan</b>	4.000.000,00	3.500.000,00	0,00	7.500.000,00	19.900.000,00	70.100.000,00	0,00	90.000.000,00	82.500.000,00	###
4.05.4.05.01.29.01	Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme	4.000.000,00	3.500.000,00	0,00	7.500.000,00	19.900.000,00	70.100.000,00	0,00	90.000.000,00	82.500.000,00	###
4.06	<b>Pendidikan dan Pelatihan</b>	5.250.000,00	9.750.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
4.06.4.01.25	<b>KECAMATAN BAWANG</b>	5.250.000,00	9.750.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
4.06.4.01.25.19	<b>Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa</b>	5.250.000,00	9.750.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
4.06.4.01.25.19.04	Monitoring Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Peningkatan Pembinaan SDM	5.250.000,00	9.750.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
4.07	<b>Penelitian dan Pengembangan</b>	124.500.000,00	550.650.000,00	0,00	675.150.000,00	135.400.000,00	539.750.000,00	0,00	675.150.000,00	0,00	0,00
4.07.4.03.01	<b>BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	124.500.000,00	550.650.000,00	0,00	675.150.000,00	135.400.000,00	539.750.000,00	0,00	675.150.000,00	0,00	0,00
4.07.4.03.01.54	<b>Program Penelitian dan Pengkajian Pembangunan Daerah</b>	107.700.000,00	397.450.000,00	0,00	505.150.000,00	109.300.000,00	395.850.000,00	0,00	505.150.000,00	0,00	0,00
4.07.4.03.01.54.01	Penelitian dan Pengkajian Daerah	72.300.000,00	262.700.000,00	0,00	335.000.000,00	73.900.000,00	261.100.000,00	0,00	335.000.000,00	0,00	0,00
4.07.4.03.01.54.02	Fasilitas Dewan Riset Daerah	28.500.000,00	109.150.000,00	0,00	137.650.000,00	28.500.000,00	109.150.000,00	0,00	137.650.000,00	0,00	0,00
4.07.4.03.01.54.03	Publikasi Hasil Kelitbangan	6.900.000,00	25.600.000,00	0,00	32.500.000,00	6.900.000,00	25.600.000,00	0,00	32.500.000,00	0,00	0,00
4.07.4.03.01.55	<b>Program Pengembangan Inovasi dan Penerapan Iptek</b>	16.800.000,00	153.200.000,00	0,00	170.000.000,00	26.100.000,00	143.900.000,00	0,00	170.000.000,00	0,00	0,00
4.07.4.03.01.55.01	Fasilitasi Krenova	6.800.000,00	63.200.000,00	0,00	70.000.000,00	6.800.000,00	63.200.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00
4.07.4.03.01.55.02	Penguatan Sistem Inovasi Daerah	10.000.000,00	90.000.000,00	0,00	100.000.000,00	19.300.000,00	80.700.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH</b>	82.235.743.550,00	401.363.913.041,00	211.896.339.565,00	695.495.996.156,00	100.856.872.260,00	406.367.932.611,00	272.952.539.120,58	780.177.343.991,58	84.681.347.835,58	12,18

BATANG, 5 Nopember 2019  
BUPATI BATANG

ttd

WIHAJI





**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**  
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN**  
**URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA**  
 TAHUN ANGGARAN 2019

KODE	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
01	<b>PELAYANAN UMUM</b>	657.508.106.663,00	665.160.060.848,00	7.651.954.185,00	1,16
01 2 03	Pangan	11.746.843.714,00	11.139.943.809,00	(606.899.905,00)	(5,17)
01 2 05	Lingkungan Hidup	11.519.555.391,00	12.572.003.196,00	1.052.447.805,00	9,14
01 2 10	Komunikasi dan Informatika	10.889.772.451,00	11.608.471.514,00	718.699.063,00	6,60
01 2 14	Statistik	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00
01 2 18	Kearsipan	461.700.000,00	443.700.000,00	(18.000.000,00)	(3,90)
01 4 01	Administrasi Pemerintahan	108.495.074.802,81	110.114.002.375,00	1.618.927.572,19	1,49
01 4 02	Pengawasan	9.048.184.717,00	9.837.361.159,00	789.176.442,00	8,72
01 4 03	Perencanaan	8.019.362.395,00	7.893.544.822,00	(125.817.573,00)	(1,57)
01 4 04	Keuangan	489.185.546.417,19	489.833.977.384,00	648.430.966,81	0,13
01 4 05	Kepegawaian	7.001.916.775,00	10.576.906.589,00	3.574.989.814,00	51,06
01 4 06	Pendidikan dan Pelatihan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
01 4 07	Penelitian dan Pengembangan	675.150.000,00	675.150.000,00	0,00	0,00
03	<b>KETERTIBAN DAN KEAMANAN</b>	9.454.996.053,00	9.520.786.336,00	65.790.283,00	0,70
03 1 05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	9.454.996.053,00	9.520.786.336,00	65.790.283,00	0,70
04	<b>EKONOMI</b>	91.948.025.355,00	71.724.420.835,00	(20.223.604.520,00)	(21,99)
04 2 07	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.441.040.900,00	7.440.274.817,00	(766.083,00)	(0,01)
04 2 09	Perhubungan	37.777.384.287,00	28.000.782.250,00	(9.776.602.037,00)	(25,88)
04 2 11	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	460.000.000,00	460.000.000,00	0,00	0,00
04 2 12	Penanaman Modal	6.242.105.423,00	6.141.223.759,00	(100.881.664,00)	(1,62)
04 3 01	Kelautan dan Perikanan	19.480.101.009,00	9.155.338.206,00	(10.324.762.803,00)	(53,00)
04 3 03	Pertanian	8.676.865.070,00	8.680.215.070,00	3.350.000,00	0,04
04 3 04	Kehutanan	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00
04 3 06	Perdagangan	10.501.706.167,00	10.022.621.734,00	(479.084.433,00)	(4,56)
04 3 07	Perindustrian	1.251.822.499,00	1.706.964.999,00	455.142.500,00	36,36
04 3 08	Transmigrasi	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	0,00
05	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>	125.122.000,00	369.408.734,00	244.286.734,00	195,24
05 2 04	Pertanahan	125.122.000,00	369.408.734,00	244.286.734,00	195,24



KODE	URAIAN		JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	
					JUMLAH (Rp)	%
1	2		3	4	5= 4 - 3	6
06		<b>PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM</b>	134.031.132.316,00	173.991.216.091,58	39.960.083.775,58	29,81
06	1	03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	114.613.703.916,00	154.149.788.120,58	39.536.084.204,58	34,50
06	1	04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	19.417.428.400,00	19.841.427.971,00	423.999.571,00	2,18
07		<b>KESEHATAN</b>	313.322.864.514,00	347.025.848.602,00	33.702.984.088,00	10,76
07	1	02 Kesehatan	306.331.455.814,00	339.720.713.740,00	33.389.257.926,00	10,90
07	2	08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.991.408.700,00	7.305.134.862,00	313.726.162,00	4,49
08		<b>PARIWISATA DAN BUDAYA</b>	13.203.870.408,00	14.320.578.197,00	1.116.707.789,00	8,46
08	2	16 Kebudayaan	2.247.315.000,00	2.363.525.000,00	116.210.000,00	5,17
08	3	02 Pariwisata	10.956.555.408,00	11.957.053.197,00	1.000.497.789,00	9,13
10		<b>PENDIDIKAN</b>	576.103.973.124,00	593.534.657.333,00	17.430.684.209,00	3,03
10	1	01 Pendidikan	566.592.886.299,00	583.615.242.724,00	17.022.356.425,00	3,00
10	2	13 Kepemudaan dan Olah Raga	3.572.673.750,00	4.002.673.750,00	430.000.000,00	12,04
10	2	17 Perpustakaan	5.938.413.075,00	5.916.740.859,00	(21.672.216,00)	(0,36)
11		<b>PERLINDUNGAN SOSIAL</b>	25.768.268.023,00	24.493.476.057,00	(1.274.791.966,00)	(4,95)
11	1	06 Sosial	8.411.821.159,00	8.310.446.707,00	(101.374.452,00)	(1,21)
11	2	01 Tenaga Kerja	5.360.031.569,00	4.731.933.263,00	(628.098.306,00)	(11,72)
11	2	02 Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	4.473.095.296,00	4.556.956.552,00	83.861.256,00	1,87
11	2	06 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.523.319.999,00	6.894.139.535,00	(629.180.464,00)	(8,36)
			1.821.466.358.456,00	1.900.140.453.033,58	78.674.094.577,58	4,32

BATANG, 5 Nopember 2019  
BUPATI BATANG

ttd

WIHAJI

Lampiran VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
 NOMOR 9 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
 DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2019



**DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PERGOLONGAN DAN PERJABATAN  
 TAHUN ANGGARAN 2019**

GOLONGAN	ESELON					TOTAL
	I	II	III	IV	STAF	
Golongan IV/e	-	-	-	-	-	0
Golongan IV/d	-	1	0	0	1	2
Golongan IV/c	-	27	1	0	9	37
Golongan IV/b	-	1	44	0	128	173
Golongan IV/a	-	0	82	52	1884	2018
<b>JUMLAH GOLONGAN IV</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>127</b>	<b>52</b>	<b>2022</b>	<b>2230</b>
Golongan III/d	-	0	9	236	393	638
Golongan III/c	-	0	0	126	481	607
Golongan III/b	-	0	0	23	833	856
Golongan III/a	-	0	0	5	893	898
<b>JUMLAH GOLONGAN III</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>390</b>	<b>2600</b>	<b>2999</b>
Golongan II/d	-	0	0	0	146	146
Golongan II/c	-	0	0	0	702	702
Golongan II/b	-	0	0	0	209	209
Golongan II/a	-	0	0	0	156	156
<b>JUMLAH GOLONGAN II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1213</b>	<b>1213</b>
Golongan I/d	-	0	0	0	23	23
Golongan I/c	-	0	0	0	106	106
Golongan I/b	-	0	0	0	5	5
Golongan I/a	-	0	0	0	2	2
<b>JUMLAH GOLONGAN I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136</b>	<b>136</b>
<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>136</b>	<b>442</b>	<b>5971</b>	<b>6578</b>

BATANG, 5 Nopember 2019  
 BUPATI BATANG

ttd

WIHAJI



Lampiran VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
NOMOR 9 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN  
DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI  
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	SKPD	NAMA KEGIATAN	JUMLAH TAHUN AWAL PENGANGGARAN	JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2018		JUMLAH REALISASI S/D AKHIR TAHUN 2018	JUMLAH SISA ANGGARAN YANG DIANGGARKAN TAHUN INI	
				APBD 2018	APBD P 2018		APBD 2019	APBD P 2019
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>			-	-	-	-	-	-

BATANG, 5 Nopember 2019  
BUPATI BATANG

ttd

WIHAJI



LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
NOMOR : 9 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2019

**KABUPATEN BATANG**  
**DAFTAR PINJAMAN DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

NO.	SUMBER PINJAMAN DAERAH	DASAR HUKUM PINJAMAN/ OBLIGASI	TGL/THN PERJANJIA N PINJAMAN/ OBLIGASI	JML PINJAMAN/NILAI NOMINAL OBLIGASI	JANGKA WAKTU PINJAMAN	PERSENTASE BUNGAN PINJAMAN (%)	TUJUAN PENGGUNAAN PINJAMAN	JUMLAH PEMBAYARAN TAHUN INI		JUMLAH SISA PEMBAYARAN (Rp)	
								POKOK PINJAMAN DAERAH	BUNGA & JASA BANK	POKOK PINJAMAN DAERAH	BUNGA
		JUMLAH									

BATANG, 5 Nopember 2019  
BUPATI BATANG

ttd

WIHAJI